**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)**

 **TAHUN 2022**



**DESA PAGERDAWUNG**

**KECAMATAN RINGINARUM**

 **KABUPATEN KENDAL**

PENGANTAR

 Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.

 Seiring dengan telah diundangkannya peraturan peraturan tersebut di atas, maka Kepala Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum mempunyai kewajiban melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati Kendal paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa. Selain itu dalam upaya penyusunan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 agar mendekati sempurna, lebih informatif dan mudah dievaluasi yang dilakukan oleh Bupati, maka Kepala Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum selain mendapat bimbingan dari SKPD terkait juga melakukan studi banding ke desa lain dengan tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di desa Pagerdawung sesuai dengan data dan fakta.

Pagerdawung, Februari 2022

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

**WAHYU ARIYANTO, S.E.**

**DAFTAR ISI**

SAMPUL ................................................................................................................ii

PENGANTAR...........................................................................................................iii

DAFTAR ISI........................................................................................................................iv

1. PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN................................................................................

B. VISI MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA..............................

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.............................................................................................

II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN APBDESA TA.2022

A. PROGRAM KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA...........................................

B. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBANGUNAN.........................................................

C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN...............

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA……

E. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK

 DAN DARURAT DESA............................................................................

F. PELAKSANAAN APBDes TAHUN 2022..............................................…

G. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA UNTUK MENGATASI…

III. PENUTUP...........................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

*1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.1)*

*2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.2)*

*3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Form. B)*

*4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*

*5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*

*6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*

*7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*

*8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.*





**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Adapun tujuan dari penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran ;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat pemerintah desa Pagerdawung Kecamata Ringinarum beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan pada tahun berikutnya ;
6. Agar desa memiliki dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum yang berkekuatan hukum tetap.

**B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

 **PAGERDAWUNG**

 Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan antara pembangunan daerah Kabupaten Kendal dengan pembangunan desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum ditetapkan dalam bentuk Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMDesa Pagerdawung tahun 2020– 2026.

 Visi merupakan pandangan jauh ke depan ke mana dan bagaimana Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal harus dibawa dan berkarya agar konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita –cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dan nilai- nila luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder.

 Berpihak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Desa Pagerdawung adalah sebagai berikut:

***“*Gotong Royong Membangun Desa Pagerdawung Yang Kreatif, Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia*”.***

 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sehingga misi berfungsi mempersatukan gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen pemerintahan desa tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintahan Desa Pagerdawung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

3

**C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

 Dari tujuan serta serta sasaran yang dicapai pada Visi, Misi Kepala Desa Pagerdawung, dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan, diantaranya ditempuh melalui 6 (enam) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas dibidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan melaksanakan program sebagai berikut :

 a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

 b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi;

 c. Pendataan penduduk dan potensi desa;

 d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor desa.

 2. Melaksanakan Bidang Pembangunan Desa dengan program sebagai berikut :

 a. Program pelayanan dasar;

 b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;

 c. Program pembangunan ekonomi lokal.

1. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa dengan program sebagai berikut :

 a. Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan desa;

 b. Pembinaan Keagamaan dan ketentraman desa;

 c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan program sebagai berikut :
2. Perencanaan Pembangunan;
3. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya;
5. Menciptakan Lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
7. Menetapkan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum sebagai desa yang lebih

 maju dalam membangun desa dengan kebersamaan dan fokus pengembangan

 ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan

 komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan desa maupun daerah

 lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

 Selain itu juga disusun langkah-langkah operasional pembangunan desa, yaitu

 sebagai berikut :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan;
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan;
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

 Menetapkan prioritas pengembangan desa, yaitu :

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan;
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum;
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi;
4. Pembangunan Manusia Desa Pagerdawung.

**BAB II**

**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN APBDESA 2022**

**A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

 Merupakan uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2020 - 2026) sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pada tahun 2022 program kerja bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 732.463.623 yang terdiri dari :

1. Alokasi Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 329.614.266; (termasuk Silpa ADD tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5.485.266;)
2. Pendapatan Asli Desa dengan anggaran sebesar Rp. 234.500.000;
3. Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.368.757;
4. Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 58.980.600; (Termasuk Silpa DD tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 5.502.800; )

Pelaksanaan program kerja bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun 2022 secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Pembayaran Siltap dan tunjangan Kepala Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000; lokasi kegiatan di Desa Pagerdawung, jumlah peserta 1 tahun berlangsung selama 1 tahun.
2. Pembayaran siltap dan tunjangan Perangkat Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 237.060.200; lokasi di desa Pagerdawung, jumlah peserta 1 sekdes dan 7 perangkat desa berlangsung selama 1 tahun.
3. Pembayaran Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.748.788; lokasi di desa Pagerdawung jumlah peserta 1 kepala desa, 1 sekdes dan 7 perangkat desa berlangsung selama 1 tahun.
4. Operasional Kantor Desa dan honor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.212.000; lokasi di desa Pagerdawung jumlah peserta penerima honor 1 kepala desa, 1 sekdes dan 3 perangkat desa dan 1 penjaga balai desa berlangsung selama 1 tahun.
5. Pembayaran tunjangan BPD dan jaminan Ketenagakerjaan BPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.175.828; lokasi di desa Pagerdawung jumlah peserta 7 orang ( 1 orang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 ) berlangsung selama 1 tahun.
6. Pembayaran Operasional BPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.200.000; lokasi di desa Pagerdawung jumlah peserta 7 orang ( 1 orang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 ) berlangsung selama 1 tahun.
7. Penyediaan insentif RT/RW dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.979.000; lokasi di desa Pagerdawung jumlah peserta 16 RT dan 4 RW berlangsung selama 1 tahun.
8. Pembayaran Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.400.000; lokasi di desa Pagerdawung jumlah peserta 1 kepala desa, 1 sekdes dan 7 perangkat desa berlangsung selama 1 tahun.
9. Pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan SDgs (profil Desa) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.637.800; lokasi di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
10. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdeskus BLT DD) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000; lokasi di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
11. Penyusunan Kebijakan Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000 di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
12. Pengembangan sistem informasi desa ( Pengadaan 2 unit Laptop ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.324.000; di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**RINCIAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**TAHUN 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Bidang** | **Kegiatan** | **Banyaknya** |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Peraturan perundang-undangan | a. Peraturan Desa | 4 |
|  |  | b. Peraturan Bersama Kepala Desa | 1 |
|  |  | c. Peraturan Kepala Desa | 5 |
|  |  | d. Keputusan Kepala Desa | 7 |
|  |  |  |  |
| 2. | Kependudukan | a. Jumlah Penduduk: |  |
|  |  |  1) Laki-laki  | 1.058 |
|  |  |  2) Perempuan  | 1.173 |
|  |  |  3) Jumlah Kepala Keluarga  |  771 |
|  |  |  4) Jumlah Anggota Keluarga  | 1.460 |
|  |  |  5) Jumlah Jiwa | 2.231 |
|  |  | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: |  |
|  |  |  1) Pendidikan umum | 1.589 |
|  |  |  2) Pendidikan Khusus |  62 |
|  |  | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata  Pencaharian  |  |
|  |  | 1. PNS
 |  29 |
|  |  | 1. TNI
 |  0 |
|  |  | 1. swasta
 |  514 |
|  |  | 1. Lain-lain
 |  864 |
|  |  | 1. Pelajar/mahasiswa
 |  268 |
|  |  | 1. Belum bekerja
 |  556 |
|  |  |  |  |
| 3. | Pertanahan | a. Status Tanah : |  |
|  |  |  1) Sertifikat Hak Milik |  |
|  |  |  2) Sertifikat Hak guna Usaha |  |
|  |  |  3) Sertifikat Hak Pakai  |  |
|  |  | b. Luas Tanah |  |
|  |  |  1) Bersertifikat |  |
|  |  |  2) Belum bersertifikat |  |
|  |  |  3) Tanah Kas Desa |  |
|  |  |  |  |
|  |  | c. Peruntukan |  |
|  |  |  1) Jalan |  |
|  |  |  2) Tanah Ladang  |  |
|  |  |  3) Bangunan Umum |  |
|  |  |  4) Perumahan |  |
|  |  |  5) Ruang Fasilitas Umum |  |
|  |  | d. Tanah yang belum dikelola |  |
|  |  |  1) Hutan |  |
|  |  |  2) Rawa-rawa |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Manajemen Pemerintahan | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa |  |
|  |  |  1) PNS  | - |
|  |  |  2) Non PNS | 9 |
|  |  | b. Jumlah Anggota BPD  | 7 |
|  |  | c. Musyawarah Desa |  6 |
|  |  | d. Musrenbangdes |  2 |
|  |  | e. Musyawarah BPD |  5 |
|  |  |  |  |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban | a. Pembinaan Hansip |  |
|  |  |  1) Jumlah Anggota |  20 |
|  |  |  2) Alat Pemadam Kebakaran | - |
|  |  |  3) Jumlah Hansip terlatih | 20 |
|  |  | b. Ketentraman dan Ketertiban |  |
|  |  |  1) Jumlah kejadian kriminal | 2 |
|  |  |  2) Jumlah bencana alam | 1 |
|  |  |  3) Jumlah operasi penertiban | - |
|  |  |  4) Jumlah pos Keamanan | 20 |
|  |  |  5) Jumlah Kecelakaan Remaja |  0 |
|  |  |  |  |
| 6. | Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan |  |
|  |  |  1) RT/RW – Ada/tidak | Ada |
|  |  |  2) PKK – Ada/tidak | Ada |
|  |  |  3) Karang taruna – Ada/tidak | Ada |
|  |  |  4) Pos Pelayanan Terpadu –  Ada/tidak | Ada |
|  |  |  5) LPM – Ada/tidak | Ada |
|  |  | b. Lembaga Kemasyarakatan  membantu pemerintah desa  dalam penyelenggaraan  pemerintah, pelaksanaan  pembangunan, pembinaan,  dan pemberdayaan masyarakat  – Ya/tidak | Ya |
|  |  | c. Lembaga Kemasyarakatan  sebagai wadah partisipasi  masyarakat dan sebagai mitra  pemerintah desa – Ya/tidak  | Ya |
|  |  | d. Lembaga kemasyarakatan  diikutsertakan dalam  pelaksanaan program sektor  dan program pemerintah  daerah – Ya/tidak | Ya |
|  |  | e. Lembaga Adat – Ada/tidak | - |
|  |  | f. Lembaga adat dibentuk dengan  peraturan desa terpisah dengan  lembaga kemasyarakatan –  Ya/tidak | - |
|  |  |  |  |

 Pagerdawung, Februari 2023

 Kepala Desa Pagerdawung

 WAHYU ARIYANTO, S.E.

DAFTAR APARATUR PEMERINTAHAN DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM TAHUN 2022

1. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **PURNA TUGAS/ AMJ** |
| 1. | WAHYU ARIYANTO, S.E. | Kades | 11 – Mei – 2026 |
| 2. | NUR FATONI | Sekretaris Desa  | 14 – Des – 2047 |
| 3. | NUR WAKHID | Kasi Pelayanan ( Modin ) | 08 – Apr – 2029 |
| 4. | FATCHUR ROCHMAN | Kaur Umum | 10 – Des – 2035 |
| 5. | AHMAD KUSNINDAR | Kaur Keuangan | 25 – Des – 2024 |
| 6. | ROZIKIN | Kadus 3 Dukuh Glagah  | 04 – Feb – 2032 |
| 7. | JAMBARI | Kadus 1 Dukuh Dermani | 24 – Juli – 2039 |
| 8. | ROSIDIN | Kadus 2 Dukuh Dawung | 03 – Feb – 2039 |
| 9. | ROHADI | Kasi Pemerintahan | 13 – Sept – 2038 |

1. DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

|  |
| --- |
|  |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **PURNA TUGAS/ AMJ** |
| 1. | Ky. Abdul Jalil Firdaus S.Ag | Ketua | 10 – 10 – 2025 |
| 2. | Moh.Abdusoim | Wakil Ketua | 10 – 10 – 2025 |
| 3. | Fatikhin | Sekretaris | 10 – 10 – 2025 |
| 4. | Siti Nurjanah | Ketua Bidang | 10 – 10 – 2025 |
| 5. | Saeful Umar | Ketua Bidang | 10 – 10 – 2025 |
| 6. | Sugiyarti | Anggota | 10 – 10 – 2025 |
| 7. | Rahmat Setiawan Budiarto | Anggota | 10 – 10 – 2025 |

Pagerdawung, 31 Desember 2022

 Kepala Desa Pagerdawung

 WAHYU ARIYANTO, S.E.

LAMPIRAN III

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA LKD / NAMA PENGURUS** | **JABATAN** | **PURNA TUGAS/ AMJ** |
| I. | **LPMD** |  |  |
|  1. | AHMAD SAIFUDIN | Ketua  | 09 – 09 – 2025 |
|  2. | NUR KHASANUDIN | Sekretaris | 09 – 09 – 2025 |
|  3. | NASIKIN | Bendahara  | 09 – 09 – 2025 |
|  4. | M. NADHIF AZIZULLAH | Seksi Pemberdayaan Perempuan | 09 – 09 – 2025 |
|  5. | SUDIYARTO | Seksi Pemberdayaan ekonomi dan Kerakyatan | 09 – 09 – 2025 |
| II. | **Tim Penggerak PKK** |  |  |
| 1. | FITRI HANDAYANI | KETUA | 21 – 08 – 2025 |
| 2. | SRI ENI WURYANTI | WAKIL KETUA  | 21 – 08 – 2025 |
| 3. | RISKA NUR ANISA | SEKRETARIS | 21 – 08 – 2025 |
| 4. | SULASTRI | WAKIL SEKRETARIS | 21 – 08 – 2025 |
| 5. | VIVIN DYAH N | BENDAHARAM | 21 – 08 – 2025 |
| 6. | ITOATUN NISA | WAKIL BENDAHARA | 21 – 08 – 2025 |
| 7. | MUYASAROH | KETUA POKJA I | 21 – 08 – 2025 |
| 8. | UMI LUTHFIYATI | WAKET POKJA I | 21 – 08 – 2025 |
| 9. | WIDYA ISMADEWI H | ANGGOTA POKJA I | 21 – 08 – 2025 |
| 10. | ISTIQOMAH | ANGGOTA POKJA I | 21 – 08 – 2025 |
| 11. | MARINI | ANGGOTA POKJA I | 21 – 08 – 2025 |
| 12. | LUTFIMATUL KHIDMA | KETUA POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 13. | SRI SITI JUHARTI N | WAKET POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 14. | NOVE ELISA | ANGGOTA POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 15. | WARKATI | ANGGOTA POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 16. | WIWIK ABIDIN | ANGGOTA POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 17. | ISKA NURMANINGTYAS | ANGGOTA POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 18. | SITI UMAROH | ANGGOTA POKJA II | 21 – 08 – 2025 |
| 19. | ANIK ALIYANTI | KETUA POKJA III | 21 – 08 – 2025 |
| 20. | YUNI FATRIATI | WAKET POKJA III | 21 – 08 – 2025 |
| 21. | NURUL LAILATUL HIDAYAH | ANGGOTA POKJA III | 21 – 08 – 2025 |
| 22. | MUNFAIZAH | ANGGOTA POKJA III | 21 – 08 – 2025 |
| 23. | SITI NUR AZIZAH | ANGGOTA POKJA III | 21 – 08 – 2025 |
| 24. | MUNAWAROH | ANGGOTA POKJA III | 21 – 08 – 2025 |
| 25. | EVI ERISANTI | KETUA POKJA IV | 21 – 08 – 2025 |
| 26. | DEWI ROSARI INDAH | WAKET POKJA IV | 21 – 08 – 2025 |
| 27. | DINA KRISTIANY | ANGGOTA POKJA IV | 21 – 08 – 2025 |
| 28. | KHOFIFATUZ ZAHRO | ANGGOTA POKJA IV | 21 – 08 – 2025 |
| 29. | ROKHAYATI | ANGGOTA POKJA IV | 21 – 08 – 2025 |
| 30. | SRI ARNIK | ANGGOTA POKJA IV | 21 – 08 – 2025 |
| 31. | SITI NURJANAH | PENASEHAT | 21 – 08 – 2025 |
|  |  |  |  |
| III. | **Karang Taruna “Rindang Jaya”** |  |  |
| 1. | YAYANG SUHARYADI | Ketua | 10-08-2026 |
| 2. | JAFAR ABDUL AFIF | Wakil Ketua I | 10-08-2026 |
| 3. | AHMAD JULIO | Wakil Ketua II | 10-08-2026 |
| 4. | AMRINA ROSADA | Sekretaris | 10-08-2026 |
| 5. | ULYA AFIDATUN NIKMAH | Wakil Sekretaris | 10-08-2026 |
| 6. | IGUH TRINANDA W | Bendahara | 10-08-2026 |
| 7. | ARINA MANASIKANA | Wakil bendahara | 10-08-2026 |
| 8. | LUKMAN BUDI PRASETYO | Seksi bidang pelatihan dan pendidikan | 10-08-2026 |
| 9. | ITOATUN NISA | Seksi bidang pelatihan dan pendidikan | 10-08-2026 |
| 10. | SAMIUL BASIR | Seksi bidang keagamaan dan kerohanian | 10-08-2026 |
| 11. | NAFIS | Seksi bidang keagamaan dan kerohanian | 10-08-2026 |
| 12. | AFIF ARWANI | Seksi bidang keagamaan dan kerohanian | 10-08-2026 |
| 13. | IMAM LATIF F | Seksi bidang olah raga | 10-08-2026 |
| 14. | FARKHAN | Seksi bidang olah raga | 10-08-2026 |
| 15. | IDA AIMAN SAFITRI | Seksi bidang olah raga | 10-08-2026 |
| 16. | ARI SAHIYAN | Seksi bidang ekonomi dan sosial | 10-08-2026 |
| 17. | SATRIO WONGSO DEWO | Seksi bidang ekonomi dan sosial | 10-08-2026 |
| 18. | NADIATU ROHMAH | Seksi bidang ekonomi dan sosial | 10-08-2026 |
|  19. | MUFIS | Seksi hubungan kemasayarakatan | 10-08-2026 |
| 20. | ADIB ANAS | Seksi hubungan kemasayarakatan | 10-08-2026 |
| 21. | JUAHMAD | Seksi hubungan kemasayarakatan | 10-08-2026 |
| 22. | MUCH BAIDI | Seksi Seni dan budaya | 10-08-2026 |
| 23. | ARIF RIFAI | Seksi Seni dan budaya | 10-08-2026 |
| IV. | Ketua RT dan RW |  |  |
| 1. | SOBIRIN | Ketua RW 001 | 10-08-2026 |
|  | SODRI | Ketua RT 001 RW 001 | 10-08-2026 |
|  | KOMARI | Ketua RT 002 RW 001 | 10-08-2026 |
|  | ABIDIN | Ketua RT 003 RW 001 | 10-08-2026 |
|  | AGUS ARIYANTO | Ketua RT 004 RW 001 | 10-08-2026 |
|  | SAKRONI | Ketua RW 002 | 10-08-2026 |
|  | NUR ABIDIN | Ketua RT 001 RW 002 | 10-08-2026 |
|  | YABIDIN | Ketua RT 002 RW 002 | 10-08-2026 |
|  | M.ROSYIDIN | Ketua RT 003 RW 002 | 10-08-2026 |
|  | M.NUR HASAN | Ketua RT 004 RW 002 | 10-08-2026 |
|  | SUMARI | Ketua RW 003 | 10-08-2026 |
|  | ROHMAT | Ketua RT 001 RW 003 | 10-08-2026 |
|  | M.MASKUN | Ketua RT 002 RW 003 | 10-08-2026 |
|  | M.NUR FATONI | Ketua RT 003 RW 003 | 10-08-2026 |
|  | MUHAMMAD ROZIKIN | Ketua RT 004 RW 003 | 10-08-2026 |
|  | NASIRIN | Ketua RW 004 | 10-08-2026 |
|  | KUNDHORI | Ketua RT 001 RW 004 | 10-08-2026 |
|  | HERI HARIYANTO | Ketua RT 002 RW 004 | 10-08-2026 |
|  | MAS’UD | Ketua RT 003 RW 004 | 10-08-2026 |
|  | SUBKHI | Ketua RT 004 RW 004 | 10-08-2026 |
|  |  |  |  |

Desa Pagerdawung, Februari 2022

 Kepala Desa Pagerdawung

WAHYU ARIYANTO, S.E.

**B****. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

 Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pada tahun 2022 program kerja bidang Pembangunan desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.1.050.856.200; yang terdiri dari :

1. Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 350.856.200; (termasuk Silpa Dana Desa tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 30.855.000;)
2. Bantuan Keuangan Khusus Dusun (BKK Dusun) Kab.Kendal dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000;
3. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000;

Pelaksanaan program kerja bidang Pembangunan Desa pada tahun 2022 secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Operasional PAUD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.200.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
2. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi masyarakat (perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelatihan terhadap anak dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.850.00; lokasi desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
3. Operasional Perpustakaan Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000; lokasi desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
4. Pengembangan dan pembinaan kesenian desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.405.000; lokasi Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
5. Pembangunan Gedung PKD (Posyandu) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.210.200; lokasi di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
6. Operasional Perpustakaan desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000; lokasi di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
7. Operasional kader Kesehatan desa, penanganan ODGJ, dan Pengadaan alat kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.155.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
8. Operasional POSYANDU, kelas ibu hamil, penanganan stunting dan operasional KPM dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.509.980; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
9. Penyuluhan bidang Kesehatan dan Germas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.560.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
10. Rembug Stunting dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
11. Pembangunan gorong-gorong Rt 004 RW 004 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.262.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
12. Pengadaan Alat pencacah plastik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
13. Pengadaan kaca cembung dan papan informasi RT/RW dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.350.000; lokasi di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
14. Pengadaan informasi public dengan realisasi anggaran sebesar RP. 1.500.000; lokasi di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
15. Pembayaran bulanan internet desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.604.000; lokasi di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
16. Pembangunan sender irigasi Blok Sejombor dan sebrumbun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000;
17. Pengaspalan jalan Dusun Dawung RW 003 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000;
18. Pembangunan Lampu penerangan jalan solar cell dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000;
19. Pembangunan jalan tani Dusun Glagah RT 001-002 RW 004 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000;

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pembangunan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini.

**RINCIAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANTAHUN 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Bidang** | **Kegiatan** | **Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sarana dan Prasarana | * 1. Jalan Desa (Km)
	2. Jalan Kabupaten/Kota (Km)
	3. Jalan Provinsi (Km)
	4. Jalan Negara (Km)
	5. Jembatan (Buah)

f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) | 1,75 1,50 5 Ada |
|  |  |  |  |
| 2 | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan |  |
|  |  |  Pendidikan Umum |  |
|  |  |  1) Kelompok Bermain | 1 |
|  |  |  2) Taman Kanak-kanak | 1 |
|  |  |  3) Sekolah Dasar | 1 |
|  |  |  4) Sekolah menengah | - |
|  |  |  5) Akademi  | - |
|  |  |  6) Institut/Sekolah Tinggi  | - |
|  |  |  |  |
|  |  | b. Tempat Pendidikan Khusus  |  |
|  |  |  1) Pendidikan Pesantren  | - |
|  |  |  2) Madrasah  | 1 |
|  |  |  3) Sekolah luar biasa | - |
|  |  |  4) Balai Latihan Kerja | - |
|  |  |  5) Kursus - kursus | - |
|  |  |  |  |
| 3 | Pembangunan Kesehatan | a. Rumah sakit umum Pemerintah | - |
|  |  | b. Rumah sakit umum Swasta | - |
|  |  | c. Rumah sakit kusta | - |
|  |  | d. Rumah sakit Mata | - |
|  |  | e. Rumah sakit Jiwa | - |
|  |  | F. Rumah sakit bersalin | - |
|  |  | g. Rumah Bidan  | 1 |
|  |  | h. Puskesmas/Puskesdes | 1 |
|  |  | i. Apotik | - |
|  |  |  |  |
| 4 | Pembangunan sosial budaya dan Keagamaan | a. Sarana Olahraga |  |
|  |  |  1) Lapangan umum | Ada 1 |
|  |  |  2) Lapangan Khusus  | Ada 1 |
|  |  | b. Sarana Kesenian/Kebudayaan  |  |
|  |  | 1. Gelanggang remaja
 |  |
|  |  | 1. Gelanggang Kesenian
 |  |
|  |  | 1. Gedung teater
 |  |
|  |  | 1. Gedung bioskop
 |  |
|  |  | c. Sarana sosial |  |
|  |  |  1) Panti asuhan |  |
|  |  |  2) Panti pijat tunanetra |  |
|  |  |  3) Panti wordo |  |
|  |  |  4) Panti Jompo |  |
|  |  | d. Sarana Komunikasi |  |
|  |  |  1) Radio Komunitas |  |
|  |  |  2) Papan Pengumuman  | 9 |
|  |  |  |  |
| 5 | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | a. Pembangunan Perumahan  Rakyat/pengembangan |  |
|  |  | b. Industri besar |  |
|  |  | c. Industri sedang | 1 |
|  |  | d. Industri rumah tangga | 5 |
|  |  | e. Tempat rekreasi | 1 |
|  |  | f. Hotel |  |
|  |  | g. Restoran/rumah makan |  |
|  |  | h. Saluran irigasi | 12 |
|  |  |  |  |

Pagerdawung, Februari 2023

Kepala Desa Pagerdawung

WAHYU ARIYANTO,S.E.

**C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

 Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pada tahun 2022 program kerja bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 12.460.000; yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli desa dengan anggaran sebesar Rp. 7.460.000;
2. Bantuan Keuangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000;

Pelaksanaan program kerja bidang Pembinaan kemasyarakatan desa pada tahun 2022 secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Peringatan budaya dan keagamaan desa (HUT RI) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.460.000; lokasi kegiatan di desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
2. Pembinaan dan operasional KPMD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000; lokasi kegiatan di desa Pagerdawung ,jumlah peserta 5 orang berlangsung selama 1 tahun.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**RINCIAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

**TAHUN 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Bidang** | **Kegiatan** | **Banyaknya** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sosialisasi Produk Hukum Desa | Sosialisasi Kebijakan Pemerintahtentang Desa: |  |
|  |  |  1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  Tentang Desa (Berapa Kali) | 1 |
|  |  |  2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun  2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 ( Berapa  Kali ) | - |
|  |  |  3) Peraturan Menteri mengenai Desa  | - |
|  |  |  Sosialisasi Kebijakan Pemerintah  Daerah |  |
|  |  |  1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang  Desa | - |
|  |  |  2) Sosialisasi Peraturan  Bupati/Walikota tentang Desa | 1 |
|  |  |  Sosialisasi Kebijakan Pemerintah  Desa |  |
|  |  |  1) Sosialisasi Peraturan Desa | 2 |
|  |  |  2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa | 2 |
|  |  |  3) Sosialisasi Peraturan Bersama  Kepala Desa | 1 |
|  |  |  |  |
| 2 | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan  Kewajiban Masyarakat |  |
|  |  | B. Masyarakat menyampaikan informasi  kepada Pemerintah desa | ada |
|  |  | c. Masyarakat memperoleh informasi | ya |
|  |  |  |  |

Pagerdawung, Februari 2023

 Kepala Desa Pagerdawung

 WAHYU ARIYANTO, S.E.

**D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pada tahun 2022 program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 205.245.920; yang terdiri dari :

1. Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 184.360.920;
2. Silpa Dana Desa tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 20.885.000;

Pelaksanaan program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Pembentukan dan pembinaan kelompok tani dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.651.900; lokasi kegiatan di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
2. Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.030.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
3. Pengadaan alat pencacah serba guna dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.501.000; lokasi desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
4. Pembangunan Greenhouse dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.362.820; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
5. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.900.000; lokasi Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
6. Pemeliharaan saluran irigasi tersier (PKTD) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.100.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
7. Pendataan dan pemutakhiraan ketahanan pangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.800.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
8. Pelatihan pengolahan produksi tanaman pangan dan peternakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
9. Pelatihan pengelolaan Greenhouse dengan reaalisasi anggaran sebesar Rp. 15.170.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
10. Pelatihan membatik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.745.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
11. Pelatihan seni tari dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.770.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
12. Pembentukan Kelompok usaha Bersama peternakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.263.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
13. Pelatihan managemen UMKM dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.400.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
14. Pelatihan pengelolaan BUMDesa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000; di Desa Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**RINCIAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

**TAHUN 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Bidang** | **Kegiatan** | **Banyaknya/ Jumlah** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a.Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) | 4 |
|  |  | b. Bidang Ekonomi ( Berapa Kali ) | 2 |
|  |  | c. Bidang Politik (Berapa Kali) | 2 |
|  |  | d. Bidang Lingkungan Hidup | 3 |
|  |  |  |  |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pemberdayaan Keluarga | 5 |
|  |  | b. Pemberdayaan Pemuda | 2 |
|  |  | c. Pemberdayaan Olahraga | 1 |
|  |  | d. Pemberdayaan Karang taruna | 2 |
|  |  |  |  |
| 3 | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan | 6 |
|  |  | b. Bidang Kesehatan | 12 |
|  |  |  |  |

Pagerdawung, Februari 2023

Kepala Desa Pagerdawung

 WAHYU ARIYANTO, S.E.

**E. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, MENDESAK**

 **DAN DARURAT DESA**

 Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

 Pada tahun 2022 program kerja bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat Desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 472.618..080; yang terdiri dari :

1. Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 468.118..080;
2. Silpa Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 4.500.000;

Pelaksanaan program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Penanggulangan Bencana Covid-19 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.040.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.
2. Penyaluran BLT Dana Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 410.400.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun dengan jumlah KPM 114 orang.
3. Penanggulangan keadaan darurat lainnya dengan reaalisasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000; lokasi kegiatan di Pagerdawung berlangsung selama 1 tahun.

**F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2022 Kecamatan Ringinarum, akan kami jelaskan di bawah ini :

1. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran

 Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2022.

2. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2022.

3. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 01 Tahun 2023 tentang

 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

 Pagerdawung Tahun 2022.

4. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun

 2022 yang terdiri dari :

|  |
| --- |
| A1. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2022* 1. Pendapatan Desa

 Rp. 1.444.286.773* 1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 646.999.142b. Bidang Pembangunan Rp. 239.784.300c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 26.892.906d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 49.476.100e. Bidang Tak Terduga Rp. 423.462.900  Jumlah Belanja Rp. 1.386.615.348Surplus/Defisit Rp. (57.671.425) * 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.478.575b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 70.150.000Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. ( 57.671.425) |
|  |
|  |

A.2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  | PENDAPATAN |  |  |
| 1 | 1 |  |  | *Pendapatan Asli Desa* |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | Hasil Usaha |  |  |
| 1 | 1 | 2 |  | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |  |  |
| 1 | 1 | 3 |  | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | *Pendapatan Transfer* |  |  |
| 1 | 2 | 1 |  | Dana Desa |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | Alokasi Dana Desa |  |  |
| 1 | 2 | 4 |  | Bantuan Keuangan |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  | *Pendapatan Lain lain* |  |  |
| 1 | 3 | 1 |  | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |  |  |
| 1 | 3 | 2 |  | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JUMLAH PENDAPATAN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | BELANJA |  |  |
| 2 | 1 |  |  | *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  | Penghasilan Tetap dan Tunjangan |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: |  |  |
|  |  |  |  | * Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
 |  |  |
|  |  |  |  | * Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
 |  |  |
|  |  |  |  | * Tunjangan BPD
 |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Operasional Perkantoran |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |  |  |
|  |  |  |  | * + Alat Tulis Kantor
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Benda POS
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Pakaian Dinas dan Atribut
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Pakaian Dinas
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Alat dan Bahan Kebersihan
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Perjalanan Dinas
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Pemeliharaan
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Air, Listrik,dasn Telepon
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Honor
 |  |  |
|  |  |  |  | * + dst…………………..
 |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |  |  |
|  |  |  |  | * + Komputer
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Meja dan Kursi
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Mesin TIK
 |  |  |
|  |  |  |  | * + dst……………………..
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 |  | Operasional BPD |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |  |  |
|  |  |  |  | * + ATK
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Penggandaan
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Konsumsi Rapat
 |  |  |
|  |  |  |  | * + dst ………………………….
 |  |  |
| 2 | 1 | 4 |  | Operasional RT/ RW |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |  |  |
|  |  |  |  | * + ATK
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Penggandaan
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Konsumsi Rapat
 |  |  |
|  |  |  |  | * + dst ………………………….
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |  |  |
| 2 | 2 | 1 |  | Perbaikan Saluran Irigasi |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa |  |  |
|  |  |  |  | * + Upah Kerja
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Honor
 |  |  |
|  |  |  |  | * + dst………………..
 |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal |  |  |
|  |  |  |  | * + Semen
 |  |  |
|  |  |  |  | * + Material
 |  |  |
|  |  |  |  | * + dst…………
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  | Pengaspalan jalan desa  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |  |  |
|  |  |  |  | * Upah Kerja
 |  |  |
|  |  |  |  | * Honor
 |  |  |
|  |  |  |  | * dst…………………………………..
 |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |  |  |
|  |  |  |  | * Aspal
 |  |  |
|  |  |  |  | * Pasir
 |  |  |
|  |  |  |  | * dst ……………
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |  | Kegiatan…………………………… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  |  |  |
| 2 | 3 | 1 |  | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |  |  |
|  |  |  |  | * Honor Pelatih
 |  |  |
|  |  |  |  | * Konsumsi
 |  |  |
|  |  |  |  | * Bahan Pelatihan
 |  |  |
|  |  |  |  | * dst…………………
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 2 |  | Kegiatan……………………. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat  |  |  |
| 2 | 4 | 1 |  | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |  |  |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |  |  |
|  |  |  |  | * Honor pelatih
 |  |  |
|  |  |  |  | * Konsumsi
 |  |  |
|  |  |  |  | * Bahan pelatihan
 |  |  |
|  |  |  |  | * dst…………………
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 2 |  | Kegiatan……………………….. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *5* |  |  | *Bidang Tak Terduga*  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | Kegiatan Kejadian Luar Biasa  |  |  |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |  |  |
|  |  |  |  | * Honor tim
 |  |  |
|  |  |  |  | * Konsumsi
 |  |  |
|  |  |  |  | * Obat-obatan
* dst……………………
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 2 |  | Kegiatan……………………… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JUMLAH BELANJA  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *SURPLUS / DEFISIT* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | PEMBIAYAAN  |  |  |
| *3* | *1* |  |  | *Penerimaan Pembiayaan*  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  | SILPA  |  |  |
| 3 | 1 | 2 |  | Pencairan Dana Cadangan  |  |  |
| 3 | 1 | 3 |  | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan  |  |  |
|  |  |  |  | JUMLAH ( RP ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *2* |  |  | *Pengeluaran Pembiayaan*  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |  | Pembentukan Dana Cadangan  |  |  |
| 3 | 2 | 2 |  | Penyertaan Modal Desa  |  |  |
|  |  |  |  | JUMLAH ( RP ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**G.** **KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

Adapun keberhasilan yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa

 Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang penyelenggaraan

 pemerintahan desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terbayarnya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Terbayarnya Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dan anggotanya.
3. Terbayarnya Operasional Kantor Desa dan Honorarium PKPKD dan PPKD serta honor penjaga balai desa.
4. Terbayarnya insentif/operasional RT/RW.
5. Terbayarnya tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok.
6. Terbayarnya jaminan sosial Ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa serta BPD.
7. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa ( Laptop dan printer ).
8. Terselenggaranya tata praja pemerintahan desa (Musrenbangdes, Musdes RKPDes, Musyawarah desa desa lainnya, laporan kepala Desa, tersusunnya dokumen keuangan desa, dan penyusunan RKPDes.
9. Terbayarnya operasional BPD.
10. Terlaksananya Pendataan SDGs Desa.

2. Pelaksanaan pembangunan

 Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang pembangunan pada tahun

 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya PAUD .
2. Terbangunnya Gedung POSYANDU/PKD.
3. Terpenuhinya Operasional SKD/PPKBD.
4. Terselenggaranya POSYANDU, kelas ibu hamil, Operasional KPM .
5. Tersedianya sarana prasana posyandu ( alat Kesehatan ).
6. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi masyarakat (perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelatihan terhadap anak.
7. Pembangunan sender irigasi pertanian blok sebrumbun dan sejombor.
8. Terbangunnya pengaspalan jalan Dusun Dawung RW 003.
9. Terbangunnya jalan usaha tani Dusun Glagah RT 001-002 RW 004.
10. Terbangunnya lampu penerangan jalan solar cell 16 titik.
11. Terpenuhinya penanganan Stunting.
12. Terselenggaranya Pendidikan Germas bagi masyarakat.
13. Terpenuhinya Operasional Perpustakaan desa.
14. Terselenggaranya Rembug Stunting.
15. Terbangunnya gorong-gorong Rt 004 RW 004 Dusun Glagah.
16. Tersedianya Alat pencacah plastik.
17. Pengadaan kaca cembung dan papan informasi RT/RW.
18. Tersedianya informasi publik.

 o. Terbayarnya bulanan internet desa.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa

 Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang pembinaan

 kemasyarakatan desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Operasional Linmas.
2. Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Islam ( Selamatan Desa dan santunan anak yatim dan khitan massal).
3. Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional (Malam renungan dan do’a bersama HUT RI).
4. Terpenuhinya Operasional LPMD/LKMD.
5. Terpenuhinya Operasional KPMD.
6. Terpenuhinya Operasional PKK.
7. Terpenuhinya Operasional Karang taruna.

4. Pemberdayaan masyarakat desa

 Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang pemberdayaan

 masyarakat desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya dan terbinanya kelompok tani.
2. Pemberdayaan Perempuan.
3. Pengadaan alat pencacah serba guna.
4. Pembangunan Greenhouse
5. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa.
6. Pemeliharaan saluran irigasi tersier (PKTD).
7. Pendataan dan pemutakhiraan ketahanan pangan.
8. Pelatihan pengolahan produksi tanaman pangan dan peternakan.
9. Pelatihan pengelolaan Greenhouse.
10. Pelatihan membatik.
11. Pelatihan seni tari.
12. Pembentukan Kelompok usaha Bersama peternakan.
13. Pelatihan managemen UMKM.
14. Pelatihan pengelolaan BUMDesa.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

 a. Terantisipasinya bencana pandemi covid-19.

 b. Tersalurnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 114 KPM.

 c. Terantisipasinya bencana lainnya.

 Sedangkan permasalahan yang dihadapi selama tahun anggaran 2022

 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

 Permasalahan yang dihadapi pada bidang penyelenggaraan

 pemerintahan desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

 a. Buku administrasi yang masih belum dimanfaatka maksimal.

 b. Pada Musrenbangdes masih terdapat usulan yang bukan menjadi

 prioritas untuk dijadikan prioritas utama. Masih juga terdapat

 usulan yang bukan menjadi kewenangan desa untuk bisa dibiayai

 dari Dana Desa.

 c. Kependudukan masih terdapat penduduk usia wajib KTP yang

 belum memiliki KTP Elektronik serta KK yang telah kadaluarsa

 dengan alasan masing-masing.

 d. Pertanahan, masih banyak yang belum bersertifikat dan SPT PBB

 masih banyak nama pemilik tanah yang terdahulu.

 Dan masih terdapat warga yang tidak tepat waktu dalam pembayaran

 PBB.

 e. Pelaku Pemerintahan masih belum melaksanakan tugas dan pokok

 fungsinya secara maksimal.

 f. Pelayanan masyarakat masih bersifat sentralistik.

 g. Sistem Pemerintahan ditingkat paling bawah (RT) belum berjalan

 secara optimal.

 h. Terbatasnya SDM dalam pelaksanaan pemerintahan.

 i. Kurang efektifnya perencanaan pembangunan dan pendokumentasian

 Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

 sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengisian buku administrasi sesuai tupoksi

 masing-masing.

1. Memberi pemahaman tentang kewenangan yang boleh

 dilaksanakan desa dan yang tidak boleh dilaksanakan oleh desa

 beserta sunber anggaran yang boleh digunakan.

1. Memberi sosialisasi pentingnya data kependudukan bagi warga.
2. Memberi sosialisasi tentang pertanahan dan perubahan SPT PBB serta pentingnya mebayar PBB tepat waktu dan manfaatnya untuk desa.
3. Mengoptimalkan tupoksi masing-masing pelaku pemerintahan.
4. Mengoptimalkan secara prima pelayanan terhadap masyarakat.

2. Pelaksanaan pembangunan

 Permasalahan yang dihadapi pada bidang pembangunan pada tahun

 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kendala cuaca terutama kegiatan fisik yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran.
2. Belum tepatnya waktu pengerjaan sehingga ada beberapa kegiatan yang melebihi target.
3. Saluran irigasi yang belum terpelihara secara berkala.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
5. Belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah.
6. Pelestarian lingkungan hidup yang belum maksimal.
7. Semangat gotong-royong membersihkan lingkungan yang kurang maksimal.
8. Saluran irigasi dan jalan pertanian yang belum tertata dengan baik.
9. Kelompok tani yang belum berjalan maksimal.
10. Kekurangan air pada musim kemarau.
11. Home Industri yang belum berkembang maksimal.
12. Kesulitan dalam penanaman modal dan pengelolaan BUMDes.
13. Pembangunan yang kurang merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial karena keterbatasan anggaran dan titik pembangunan.
14. Jaringan internet yang belum menyeluruh.
15. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.

 Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

 sebagai berikut :

1. Penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan

 menggandeng dinas dan instansi terkait.

1. Mulai menata jalan pertanian dan saluran irigasi.
2. Mengembangkan BUMDesa agar berkembang.
3. Mengupayakan internet desa yang menyeluruh.
4. Menginisiasi pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon dan penyediaan tempat sampah serta pelatihan pengelolaan sampah menjadi produk bernilai jual.
5. Menumbuhkan kembali semangat gotong-royong dan kepedulian terhadap lingkungan.
6. Memperbaiki sistem perencanaan pembangunan.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa

 Permasalahan yang dihadapi pada bidang pembinaan kemasyarakatan

 desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber daya di desa belum dilaksanakan secara maksimal, banyak lahan pekarangan rumah yang dibiarkan tidak termanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perkebunan, maupun industri berskala rumah tangga. Melalui PKK dan Karang taruna untuk memanfaatkan lahan kosong dan pemanfaatan barang bekas agar bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai estetika dan ekonomi.
2. Partisipasi warga dalam pertemuan masih belum maksimal. PKK diharapkan aktif penyuluhan dan pemberdayaan di lingkungan masing-masing.
3. Masih kurang maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial. Bersama seluruh lembaga desa berupaya memberi contoh dan teladan akan pentingnya kehidupan sosial ditengah masyarakat.
4. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas warga. Bersama PKK dan Lembaga Desa lain serta instansi terkait akan aktif melakukan pelatihan kreasi kemasyarakat secara umum.
5. KPMD belum berjalan secara maksimal. Kedepan akan dilaksanakan sistem penjaringan dan penyaringan dalam proses rekrutmennya.
6. Linmas dan Karangtaruna belum aktif secara maksimal karena minimnya pelatihan.

4. Pemberdayaan masyarakat desa

 Permasalahan yang dihadapi pada bidang pemberdayaan masyarakat

 desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan perempuan masih bersifat rutinan.
2. BUMDes yang belum termaksimalkan.
3. Peningkatan kapasitas perangkat desa belum merata.

 Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengubah sistem pemberdayaan dengan menambah pelatihan kreatifitas pada setiap pertemuan. Untuk BUMDes akan dilaksanakan evaluasi dan pembentukan mulai dari awal tahapan,pemetaan potensi dan pelatihan penegelolaannya sehingga diharapakan bisa berkembang dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Desa.

5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

 Permasalahan yang dihadapi pada bidang penanggulangan bencana,

 keadaan mendesak dan darurat desa pada tahun 2022 adalah sebagai

 berikut :

1. Penerima Bantuan yang belum menyeluruh. Sehingga muncul kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat kurang.

 Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberi pemahaman tentang alur dan kriteria penerima bantuan. Serta dengan terus memberikan penyuluhan tentang protokol Kesehatan dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.

LAMPIRAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PRODUK HUKUM DESA DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA PRODUK HUKUM DESA** | **NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN** | **TENTANG** |
| 1. | Peraturan Desa  | Nomor 01 Tahun 2022 | Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun 2021 |
| 2. | Peraturan Desa | Nomor 02 Tahun 2022 | Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 |
| 3. | Peraturan Desa  | Nomor 03 Tahun 2022 | Kerjasama antar desa (Bumdesma) |
| 4. | Peraturan Desa | Nomor 04 Tahun 2022 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 |
| 5. | Peraturan Desa | Nomor 05 Tahun 2021 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2023 |
| 6. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 140/1/2022 | Tim Pelaksana Kegiatan BKK dusun Dawung Tahun 2023 |
| 7.  | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/2/2022 | Tim Verifikasi RKPDes 2023 |
| 8. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/3/2022 | Tim Penyusun RKPDes 2023 |
| 9. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/4/2022 | Delegasi Musyawarah Antar Desa (MAD) |
| 10. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/5/022 | Pengurus Poktan Sebrumbun |
| 11. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/6/2022 | Pengurus Poktan Sejombor |
| 12. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/7/2027 | Paguyuban seni barong “Singo Wiro Wijoyo” |
| 13. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/08/2022 | Pokja SDGs 2022 |
| 14. | Keputusan Kepala Desa | Nomor 141/9/2022 | Penetapan SDGs 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Pagerdawung, Februari 2023 Kepala Desa PagerdawungWAHYU ARIYANTO, S.E. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA PRODUK HUKUM DESA** | **NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN** | **TENTANG** |
| 1. | Peraturan Kepala Desa  | Nomor 01 Tahun 2022 | Penetapan Nama-nama Penerima BLT DD tahun 2022 |
| 2. | Peraturan Kepala Desa | Nomor 02 Tahun 2022 | Perubahan I Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022 |
| 3. | Peraturan Kepala Desa  | Nomor 03 Tahun 2022 | Perubahan II Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022 |
| 4. | Peraturan Kepala Desa  | Nomor 04 Tahun 2022 | Penetapan KPM BLT DD tahun 2023 |
| 5. | Peraturan Kepala Desa | Nomor 05 Tahun 2022 | Penjabaran APBDes 2023 |

Pagerdawung, Febuari 2023

 Kepala Desa Pagerdawung

 WAHYU ARIYANTO, S.E.



KEPALA DESA PAGERDAWUNG

 KABUPATEN KENDAL

 PERATURAN DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERDAWUNG,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun Anggaran 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; |
|  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  | 6. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); |
|  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; |
|  | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; |
|  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; |
|  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; |
|  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 14. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; |
|  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; |
|  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; |
|  | 18. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159) ; |
|  | 19. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 20. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 21. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 22. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); |
|  | 23. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 24 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disense 2019 (Covid-19) dan atau Menghadapi Ancaman Yang Mmembahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); |
|  | 25. | Peraturan menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193) |
|  | 26. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun; |
|  | 27. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020); |
|  | 28. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
|  | 29. | Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro di Desa; |
|  | 30. | Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019; |
|  | 31. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); |
|  | 32. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13 ) |
|  | 32. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 nomor 14); |
|  | 33. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No 15) ; |
|  | 34. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); |
|  | 35. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47); |
|  | 36. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  | 37. | Keputusan Bupati Kendal nomor 900/20/2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021  |
|  | 38. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81); |
|  | 39. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal; |
|  | 40. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal; |
|  | 41. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); |
|  | 42. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74); |
|  | 43. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52); |
|  | 44. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); |
|  | 45. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); |
|  | 46. | Peraturan Bupati Kendal nomor 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran Endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 nomor 92); |
|  | 47. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 nomor 8); |
|  | 48. | Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 443.5/326/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Msayarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal; |
|  | 49. | Evaluasi Camat Ringinarum Nomor 140/15/2021 tanggal 8 Nopember 21 tentang rancangan perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2021; |
|  | 50. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2016 Nomor 09); |
|  | 51. | Keputusan Kepala Desa Pagerdawung Nomor 141/01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagerdawung No. 1 Tahun 2017); |
|  | 52. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2018 nomor 08);  |
|  | 53. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerdawung 2020-2026 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 nomor 04);  |
|  | 54. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagerdawung Tahun 2022 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2021 Nomor 05); |
|  | 55. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pagerdawung pada Badan Usaha Milik Desa Pagerdawung (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 Nomor 06); |
|  | 56. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2021 Nomor 05); |
|  | 57. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2022 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2022 Nomor 04). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERDAWUNG

dan

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERDAWUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

|  |
| --- |
| BAB IIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPasal 2 |
|  |

|  |
| --- |
| Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :  |
| (1) | Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1.496.286- dengan rincian sebagai berikut :  |
|  | a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 2.406.209.115; |  |
|  | b. | Realisaasi  | Rp 2.404.712.829; |  |
|  | Selisih lebih / (kurang) |  | Rp 1.496.286 |
|  |  |  |  |
| (2) | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 155.641.324- dengan rincian sebagai berikut :  |
|  | a. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.2.473.643.823; |  |
|  | b. | Realisaasi  | Rp 2.318.002.499; |  |
|  | Selisih lebih / (kurang) |  | Rp 155.641.324;  |
|  |  |  |  |
| (3) | Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah Rp……………. dengan rincian sebagai berikut :  |
|  | a. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (67.434.708;) |  |
|  | b. | Realisaasi  | Rp 86.710.330; |  |
|  | Selisih lebih / (kurang) |  | Rp (154.145.038) |
|  |  |  |  |
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 - dengan rincian sebagai berikut :  |
|  | a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 67.434.708; |  |
|  | b. | Realisaasi  | Rp. 67.434.708; |  |
|  | Selisih lebih / (kurang) |  | Rp. 0  |
|  |
| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0; dengan rincian sebagai berikut :  |
|  | a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 67.434.708; |  |
|  | b. | Realisaasi  | Rp. 67.434.708; |  |
|  | Selisih lebih / (kurang) |  | Rp. 0 |
|  |  |  |  |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp……………. dengan rincian sebagai berikut :  |
|  | a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp………………. |  |
|  | b. | Realisaasi  | Rp………………. |  |
|  | Selisih lebih / (kurang) |  | Rp……………... |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 3 |
| Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :  |
| 1. | Lampiran I  | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022; |
| 2. | Lampiran II | Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2022. |
| 3. | Lampiran III | Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2022; |
| Pasal 4 |
| Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini |
|  |
|  |

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikotaa.n. Camat .......ttd(...............................................) | Ditetapkan di : Pagerdawung Pada tanggal : 14 Februari 2023KEPALA DESA PAGERDAWUNG**WAHYU ARIYANTO, S.E.** |

 Diundangkan di : Pagerdawung

pada tanggal : 14 Febuari 2023

SEKRETARIS DESA PAGERDAWUNG

**NUR FATONI**

 LEMBARAN DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

KESEPAKATAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

BERITA ACARA

NOMOR 01 TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PAGERDAWUNG KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

|  |
| --- |
| Pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini : |
| 1. | WAHYU ARIYANTO, S.E. | : | Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mojo Yang beralamat di Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. | MOH.ABDUSOIM | : | Plh. Ketua BPD Desa Pagerdawung |
| 3. | FATIKHIN | : | Sekretaris BPD Desa PagerdawungDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pagerdawung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |
| Menyatakan bahwa :  |
| 1. | PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. |
| 2. | PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini. |
| 3. | Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pertauran Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini. |
| 4. | PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. |
| Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |
|  PAGERDAWUNG, 14 FEBRUARI 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEPALA DESA PAGERDAWUNGWAHYU ARIYANTO, S.E. |  | KETUA BPD DESA PAGERDAWUNGMOH.ABDUSOIM |
|  |  |  |
|  |  | SEKRETARIS BPD DESA PAGERDAWUNGFATIKHIN |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **logobaru_ukuran_kecil****KEPALA DESA PAGERDAWUNG****KABUPATEN KENDAL****PERATURAN DESA PAGERDAWUNG****NOMOR 1 TAHUN 2023****TENTANG****LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN** **REALISASI PELAKSANAAN****ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA****TAHUN ANGGARAN 2022****DESA PAGERDAWUNG****KECAMATAN RINGINARUM****KAPUTATEN KENDAL** |